

Peningkatan Pendapatan Desa Menuju Desa Mandiri Melalui Tata Kelola dan Sistem Pelaporan Keuangan Desa dan BUMDes

Enni Savitri, Andreas, Volta Diyanto, Evi Deliana, & Amir Hamzah

Universitas Riau

* enni.savitri@lecturer.unri.ac.id

Abstrak Permasalahan yang ada di BUMDes dan dana desa antara lain Kompetensi SDM kurang memadai, rawan penyalahgunaan keuangan BUMDes dan dana desa karena laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu menurut SAK-ETAP serta perlunya peningkatan akuntabilitas BUMDes dan dana desa. Ada beberapa unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes dan dana desa tetapi pada pelaporan pertanggungjawaban keuangan menurut unit usaha yang ada belum ada pedomannya, sehingga membingungkan pengelolaannya. Inovasi digitalisasi sangat dibutuhkan dalam tata kelola BUMDes dan dana desa terutama bidang digitalisasi pelaporan keuangan BUMDes dan dana desa. Tujuan pengabdian adalah Pendampingan pada pengoperasian sistem inovasi digitalisasi pelaporan keuangan BUMDes dan dana desa berdasarkan SAK-ETAP. Merancang dan membuat sistem pelaporan keuangan BUMDes dan dana desa. Solusi dari permasalahan ini adalah Memanfaatkan teknologi finansial dan digital untuk mempercepat proses pengelolaan keuangan dana desa dan bumdes. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes dan Dana Desa. Metode pelaksanaan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan BUMDes dan pengelolaan Dana Desa, antara lain Identifikasi Permasalahan, Tinjauan terhadap penggunaan Dana Desa yang telah dilakukan. Wawancara dengan aparat desa dan masyarakat untuk memahami kendala yang dihadapi. Perencanaan, Menetapkan tujuan pengelolaan Dana Desa yang jelas dan terukur. Hasil pengabdian Penggunaan Sistem Informasi Keuangan dengan implementasi sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh pengguna. Manfaatnya memudahkan pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi. Perencanaan anggaran, dan mengelola risiko keuangan. Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan dengan sistem pelaporan keuangan yang standar dan terintegrasi BUMDes dan Dana Desa.

Kata kunci: tata kelola; BUMDes; dana desa; pendapatan

Abstract. The issues with BUMDes and village funds include a lack of human resource competency, a vulnerability to financial mismanagement due to financial reports that don't follow government regulations, specifically SAK-ETAP, and the requirement for greater accountability from BUMDes and village funds. The governance of BUMDes and village funds truly needs innovation in digitalization, particularly when it comes to digitizing the financial reporting of these entities. The aim of the service is assistance in the operation of the innovation system for digitizing BUMDes financial reporting and village funds based on SAK-ETAP. Design and create a financial reporting system for BUMDes and village funds. The solution to this problem is to utilize financial and digital technology to speed up the financial management process of village and BUMDes funds. Problem identification and an evaluation of the actual and completed usage of village funds are two implementation strategies for resolving issues with managing BUMDes and village funds. interviews with residents and local officials to learn about the challenges encountered. arranging, establishing quantifiable and transparent management goals for the Village Fund. The creation of an integrated financial information system that is user-friendly is the outcome of the commitment to the usage of financial information systems. The advantages simplify record-keeping and financial management. Planning a budget and controlling financial risks. creation of a common, integrated financial reporting system for village funds and BUMDes.

Keywords: governance; bumdes; village funds; revenue

To cite this article: Savitri, E., Andreas, A., Diyanto, V., Deliana, E., & Hamzah, A. 2024. Peningkatan Pendapatan Desa Menuju Desa Mandiri Melalui Tata Kelola dan Sistem Pelaporan Keuangan Desa dan BUMDes. *Unri Conference Series: Community Engagement* 6: 150-158. <https://doi.org/10.31258/unricsce.6.150-159>

© 2024 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2024

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Desa memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan dan dikelola secara optimal oleh masyarakat setempat. Setelah ditetapkannya undang-undang desa yang memberikan wewenang dalam pengembangan potensi desa untuk kepentingan masyarakat desa. Peningkatan pembangunan desa dapat dicapai melalui pengembangan potensi ekonomi desa sebagai wadah bagi masyarakat pedesaan untuk membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) dan Dana Desa merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menggerakkan perekonomian desa (Alfian et al, 2022). BUMDes dan Dana Desa diharapkan dapat menjadi pertimbangan utama dalam menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam desa, serta mengoptimalkan sumber daya manusia dalam pengelolaannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan entitas hukum yang didirikan oleh desa, baik secara mandiri maupun bersama-sama, dengan tujuan untuk mengelola usaha (Oktari & Larasati, 2023). BUMDes bertanggung jawab untuk memanfaatkan aset desa, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan layanan, serta menjalankan berbagai jenis usaha lainnya. Semua ini dilakukan untuk mencapai keuntungan maksimal yang dapat dinikmati oleh masyarakat desa. Pengelola BUMDes dan perangkat desa sangat diharapkan memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai (Nugrahaningsih et al., 2022). Menurut Handajani et al. (2021) untuk mengembangkan potensi desa yang dapat memperkuat perekonomian desa, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan handal dalam pengelolaan BUMDes. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam tata kelola keuangan BUMDes.

BUMDes dan Dana Desa yang ideal mampu menjadi poros kehidupan masyarakat desa. Dengan keberadaan BUMDes dan Dana Desa, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, kapasitas produksi masyarakat dapat terserap, serta akses terbuka bagi seluruh elemen masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan BUMDes dan dana desa harus dilakukan secara profesional (Alfian et al, 2022). Salah satu langkah penting dalam pengelolaan tersebut yaitu dengan pengelolaan keuangan yang baik, yaitu dengan menyusun laporan keuangan yang jujur dan transparan (Savitri et al, 2022). Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes dan dana desa dapat menjadi penggerak ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, dan perbaikan infrastruktur yang mendukung kemajuan desa. Dengan adanya BUMDes dan dana desa diharapkan dapat melahirkan usaha kreatif yang mampu memberdayakan masyarakat desa sehingga memiliki tujuan akhir dimana masyarakat desa mampu mandiri dan mengembangkan desanya secara mandiri.

Menurut Alfian et al. (2022), tata kelola yang baik merupakan faktor kunci dalam menilai dan memantau keefektifan pelaporan keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan menjadikan tata kelola desa menjadi tata kelola yang transparan, inklusif dan tepat sasaran (Savitri et al, 2019). Namun, optimalisasi tata kelola dana desa dan BUMDes masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kapasitas dan pemahaman aparatur desa mengenai prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Keberadaan BUMDes masih terkesan sebagai formalitas di desa sehingga peran aktif BUMDes tersebut belum terlihat dalam tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga ditandai dengan kurangnya sumber daya dan pemahaman perangkat desa dan pengurus BUMDes dalam pengelolaan BUMDes tersebut, sehingga kinerja yang dihasilkan tidak optimal.

Kurangnya pemahaman perangkat desa tentang pengelolaan dana desa dan BUMDes juga mengakibatkan tidak terealisasi program-program BUMDesa dan dana desa secara efektif kepada masyarakat desa (Imawan & Mas'adah, 2021). Hal ini diperparah dengan fakta bahwa BUMDes dan Dana Desa seringkali hanya dikenal pada kalangan elit atau perangkat desa saja. Akibatnya, banyak dana desa dan BUMDes yang pengelolaannya didominasi oleh orang-orang dekat kepala desa atau bahkan anggota keluarganya. Situasi ini menyebabkan minimnya pengetahuan warga desa mengenai isu-isu terkait dana desa dan BUMDes.

Selain itu, salah satu aspek penting yang memerlukan perhatian khusus adalah sistem pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah elemen kunci dalam mengelola sumber daya desa secara efektif dan efisien (Lantowa & Yusuf, 2023). Tanpa sistem pelaporan yang baik, upaya peningkatan pendapatan desa dapat terhambat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dan BUMDes dapat menurun. Oleh karena itu, pendampingan dalam sistem pelaporan keuangan desa dan BUMDes merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Melalui pendampingan ini, diharapkan aparatur desa dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah desa, serta mengelola BUMDes secara profesional dan berkelanjutan.

Menurut Arfiansyah et al. (2022) penguatan kapasitas aparatur desa dalam hal pelaporan keuangan

merupakan bagian integral dalam menciptakan pelaporan yang baik. Pelaporan keuangan yang berkualitas membutuhkan pemahaman akuntansi bagi pelaksana BUMDes dan Dana Desa. Kurangnya pemahaman akuntansi, pelaku BUMDes dan Dana Desa akan merasa kesulitan untuk menerapkan laporan keuangan yang sebenarnya dikarenakan tidak adanya pedoman atau buku yang dapat dijadikan referensi untuk belajar bagaimana mengelola keuangan BUMDes dan Dana Desa. Pelatihan penyusunan laporan keuangan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan BUMDes dan Dana Desa. Kegiatan pelatihan atau training perlu dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau organisasi dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Melalui pelatihan mampu memberikan tambahan kemampuan dalam menghadapi perubahan maupun penyesuaian sistem kerja dimasa mendatang.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan desa juga harus ditingkatkan untuk mempermudah proses pelaporan dan meningkatkan akurasi data. Dalam jangka panjang, diharapkan dengan adanya sistem pelaporan keuangan yang baik dan transparan, desa-desa dapat menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan desa tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dan BUMDes (Alfirdaus et al., 2020). Dengan demikian, pelaporan keuangan yang baik dan akuntabel akan menjadi dasar bagi pembangunan desa berkelanjutan dan berkeadilan.

Identifikasi Masalah

Mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah desa Seresam, Kecamatan Siberida, Indragiri Hulu. Dari hasil tinjauan dan survei yang dilakukan tim pengabdian pada mitra yaitu di desa Seresam, Kecamatan Siberida masih memiliki beberapa kekurangan dalam hal pelaporan yaitu masih menggunakan sistem manual, sehingga sangat memungkinkan terjadinya kesalahan input. Serta mitra juga masih terdapat kesulitan dalam menerapkan standar akuntansi yang berlaku untuk desa. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan laporan keuangan yang disajikan tidak berdasarkan standar.

Berdasarkan dari analisis yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi permasalahan dalam pengabdian di desa Seresam, Kecamatan Siberida, Indragiri Hulu meliputi: (1) Dari segi pengelolaan dana desa dan BUMDes yang masih menggunakan sistem pencatatan operasional dan pelaporan keuangan dengan sistem manual dan belum adanya sistem digitalisasi dan terpadu berdasarkan SAK ETAP. (2) Belum adanya sistem aplikasi dalam pelaporan keuangan BUMDes untuk tiap usaha BUMDes dan pengelolaan dana desa belum sesuai dengan ketentuan undang-undang. (3) Sumber daya manusia yang dimiliki kurang terampil dalam hal pelaporan keuangan. (4) BUMDes sudah ada namun belum berkembang, kebanyakan unit bisnis BUMDes hanya berupa unit usaha simpan pinjam.

Tujuan Kegiatan Pengabdian

Pengabdian ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terkait pengelolaan BUMDes dan dana desa dalam upaya meningkatkan pendapatan desa. Hal ini dilakukan dengan merancang dan membuat sistem inovasi digitalisasi pelaporan keuangan BUMDes dan dana desa berdasarkan SAK-ETAP, merancang dan membuat sistem pelaporan pendampingan terhadap penggunaan sistem keuangan BUMDes dan dana desa kepada pengelola BUMDes dan dana desa, serta membuat pemasaran dengan digitalisasi produk usaha BUMDes dan dana desa.

METODE PENERAPAN

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari dua tahapan. Pertama tahap persiapan meliputi pra survei, pembentukan tim, pembuatan dan pengajuan proposal. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan program berupa sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi. Pada tahap ini diberikan penjelasan dan pelatihan kepada perangkat desa dan pengurus BUMDes mengenai urgensi sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta tata kelola yang baik dalam upaya meningkatkan pendapatan desa:

a. Tahap penyuluhan dan pendampingan

Pada tahap ini diajarkan strategi dalam mengatasi permasalahan pengelolaan BUMDes dan dana desa. Hal ini dimulai dengan melakukan pengidentifikasian masalah dan melakukan tinjauan terkait penggunaan dari dana desa serta penyusunan perencanaan. Dilakukan pembuatan perencanaan tindakan untuk memperbaiki pengelolaan dana desa. Dalam hal tata kelola BUMDes dan dana desa, diperlukan informasi terkait jumlah dana yang diperoleh desa pertahunnya. Bentuk dari kegiatannya seperti penyamaan persepsi urgensi BUMDes dan dana desa, manajemen pengelolaan BUMDes dan dana desa, serta rincian kerja pengurus dan fokus usaha.

b. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama dan pemerintah desa, yaitu Desa Seresam, sangat penting dalam memperbaiki tata kelola BUMDes dan Dana Desa. Melibatkan mereka dalam proses perbaikan akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dari solusi yang diimplementasikan. Hal ini dimulai dengan identifikasi permasalahan bersama, melakukan pertemuan bersama antara BUMDes, pemerintah desa, dan mitra terkait lainnya untuk mengidentifikasi permasalahan dalam tata kelola BUMDes dan Dana Desa. Mengumpulkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk mengetahui perspektif yang berbeda terkait permasalahan yang ada. Kemudian, menyusun rencana perbaikan tata kelola BUMDes dan Dana Desa secara bersama-sama, dengan melibatkan semua pihak terkait. Menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai.

c. Tahap evaluasi

Pada tahap ini evaluasi atas sasaran dan manfaat utamanya adalah diterapkannya strategi tata kelola dalam sistem pelaporan keuangan desa dan BUMDes yang dirancang sedemikian rupa dengan sasaran utama untuk memperbaiki serta meningkatkan sistem pelaporan keuangan desa dan BUMDes. Evaluasi ini dilakukan dengan melihat adanya perbaikan dari sistem pelaporan keuangan dan terciptanya tata kelola yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi yang lebih baik di BUMDes Berkah Bersama di desa Seresam.

Cara mengukur tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan pengabdian mengenai Peningkatan Pendapatan Desa Menuju Desa Mandiri melalui tata kelola dan sistem pelaporan keuangan desa dan BUMDes dapat dilakukan dengan metode deskriptif dan kuantitatif. Pengukuran dengan metode deskriptif yaitu 1). Evaluasi Proses, yaitu mengidentifikasi dan mendokumentasikan bagaimana tata kelola dan sistem pelaporan keuangan Desa dan BUMDes telah diimplementasikan. Penilaian deskriptif mencakup: Kualitas tata kelola yang diterapkan: Apakah terdapat peningkatan kualitas administrasi dan transparansi? Partisipasi masyarakat: Apakah ada peningkatan dalam keterlibatan masyarakat desa dalam pengelolaan BUMDes? Peningkatan pemahaman: Mengukur sejauh mana peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola BUMDes terkait pengelolaan keuangan. 2). Testimoni atau Survei: Menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan persepsi dari kepala desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat tentang manfaat tata kelola dan sistem pelaporan baru. Testimoni kualitatif ini dapat menunjukkan dampak nyata dari kegiatan tersebut. Selanjutnya pengukuran dengan metode kuantitatif yaitu Pendapatan Desa dan BUMDes. Cara mengukurnya dengan perubahan pendapatan desa dan BUMDes sebelum dan setelah program pengabdian. Peningkatan pendapatan yang signifikan menunjukkan keberhasilan dalam tata kelola dan pelaporan keuangan.

Indikator pengukuran antara lain Kenaikan jumlah pendapatan bersih BUMDes (sebelum vs. sesudah kegiatan). Peningkatan alokasi dana desa untuk proyek-proyek mandiri. Indikator Finansial: Mengukur rasio keuangan seperti *return on assets* (ROA), profit margin BUMDes, dan *cash flow* dari operasional. $ROA = (\text{Laba Bersih} / \text{Total Aset BUMDes}) \times 100\%$. Rasio Likuiditas: Mengukur kemampuan BUMDes untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Skor Kepuasan Pengguna: Kuantifikasi tingkat kepuasan *stakeholder* (pemangku kepentingan) terkait tata kelola yang lebih baik melalui survei kuantitatif. Indikator Keberhasilan tambahan yaitu jumlah pelaporan tepat waktu: persentase laporan keuangan desa dan BUMDes yang disampaikan tepat waktu. Jumlah Pelatihan yaitu banyaknya sesi pelatihan yang diberikan dan jumlah peserta yang mengikuti, dengan tujuan mengukur peningkatan kapasitas. Keberlanjutan sistem pelaporan yaitu sejauh mana desa dan BUMDes mampu mempertahankan sistem pelaporan keuangan baru secara mandiri setelah kegiatan pengabdian selesai. Dengan menggunakan kombinasi pendekatan deskriptif dan kuantitatif ini, tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian dapat dinilai secara menyeluruh.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Hasil dan capaian dari pengabdian ini berfokus pada upaya dalam peningkatan pemahaman desa melalui tata kelola sistem pelaporan keuangan desa dan sistem pelaporan keuangan BUMDes, yang dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

a. Tahap persiapan

Dalam tahap persiapan pengabdian, dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya:

- 1) Melakukan diskusi dengan tim pelaksanaan pengabdian untuk menentukan pembagian tugas di antara anggota tim.
 - 2) Melakukan diskusi dengan perangkat desa dan pengurus BUMDes tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.
 - 3) Melakukan persiapan terkait hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan
- Dalam kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian UNRI mengalami kesulitan untuk mengajak masyarakat

Pada tahap awal ini dilakukan dengan menganalisis keadaan desa Seresam terkait masalah-masalah dalam hal tata kelola di desa dan sistem pelaporan keuangan di desa Seresam. Dari analisis yang dilakukan ditemukan permasalahan terkait kurangnya pemahaman perangkat desa dan BUMDes tentang tata kelola yang baik dan sistem pelaporan keuangan. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala dalam pengimplementasian sistem pelaporan keuangan yang baik yang menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap desa dan BUMDes.

b. Tahap pelaksanaan kegiatan

Tahap pelaksanaan kegiatan dimulai dengan persiapan untuk pelaksanaan kegiatan, hal ini mencakup pertemuan dengan tim pelaksana, menghubungi dan memberitahu kepala desa dan pengurus BUMDes terkait rancangan kegiatan di desa Seresam, Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu.

1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada BUMDes Berkah Bersama dan kantor desa di Desa Seresam, Kecamatan Siberida, Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

2. Penyuluhan dan pelatihan

Tahapan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu melakukan pemberdayaan dengan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada perangkat desa dan pengurus BUMDes terkait tata kelola sistem pelaporan keuangan yang baik di desa maupun di BUMDes.



Gambar 1. Pendampingan Tata Kelola Dana Desa

Sistem pelaporan keuangan yang baik diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabel di desa dan BUMDes, efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa dan BUMDes, serta dapat berujung pada peningkatan pendapatan desa dan BUMDes. Dengan dilaksanakannya metode diskusi dan praktek ini diharapkan masyarakat sasaran mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menerapkan tata kelola sistem pelaporan keuangan yang baik dalam hal ini perangkat desa dan pengurus BUMDes di BUMDes Berkah Bersama di Desa Seresam Kecamatan Siberida, Indragiri Hulu.

c. Ketercapaian sasaran

Mengacu pada sasaran program sosialisai tentang pentingnya tata kelola sistem pelaporan keuangan desa dan BUMDes pada BUMDes Berkah Bersama di Desa Seresam Kecamatan Siberida, Indragiri Hulu.



Gambar 2. Peragaan Cara Pelaporan Keuangan BUMDes dan Dana Desa

Beberapa tingkat ketercapaian sasaran program yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas perangkat desa dan pengurus BUMDes
Setelah mengikuti sosialisasi dan pelatihan, perangkat desa dan pengurus BUMDes diharapkan sekarang memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya tata kelola yang baik untuk desa dan BUMDes. Perangkat desa dan pengurus BUMDes juga menyadari betapa krusialnya sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akurat dalam upaya meningkatkan pendapatan desa dan BUMDes. Dengan hal ini, mereka diharapkan dapat mengelola sumber daya desa dengan lebih efisien, mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, dan memastikan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil demi kemajuan desa. Pelatihan ini juga membekali mereka dengan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.
- b. Transparansi dan akuntabilitas keuangan
Dengan penerapan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan desa dan BUMDes akan meningkat. Ini membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, karena setiap transaksi dan penggunaan dana dapat dipantau dengan jelas. Selain itu, sistem ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan atau penyalahgunaan dana, sehingga dapat segera diambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efisien dan efektif, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.
- c. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan
Sistem pelaporan berbasis teknologi mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan penerapan sistem ini, proses pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pengelolaan data yang lebih terintegrasi, sehingga meminimalisir kesalahan manusia dan meningkatkan transparansi. Penggunaan sistem pelaporan digital juga dapat mempermudah pengambilan keputusan berbasis data, sehingga mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi di lapangan.



Gambar 3. Pendampingan Pelaporan Keuangan BUMDes

Pendampingan pelaporan keuangan BUMDes dimulai dari pencatatan transaksi, pengumpulan bukti-bukti pengeluaran, pencatatan ke buku besar, neraca saldo dan pembuatan neraca dan laba rugi Unit usaha BUMDes. Peningkatan pendapatan desa dan BUMDes. Pengelolaan keuangan yang efektif akan mendorong perkembangan usaha desa dan BUMDes secara lebih optimal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa dan BUMDes. Selain itu, dengan adanya laporan keuangan yang transparan dan akurat, desa dapat menarik minat pihak ketiga untuk berinvestasi. Pengelolaan keuangan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak luar terhadap pengelolaan dana desa dan BUMDes, serta memungkinkan adanya perencanaan yang lebih baik untuk pengembangan jangka panjang.

Dengan pengelolaan keuangan yang baik, dana desa dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk berbagai program yang berkelanjutan, seperti pengembangan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal. BUMDes, sebagai entitas ekonomi desa, dapat memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian desa melalui usaha-usaha yang dikelola secara profesional dan berorientasi pada keuntungan. Keberhasilan pengelolaan keuangan ini akan terlihat dari laporan keuangan yang rinci dan tepat waktu, yang tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi alat evaluasi dan pengambilan keputusan strategis bagi pemangku kepentingan desa.

Sebagai hasilnya, dengan laporan keuangan yang terstruktur dan transparan, desa dapat menunjukkan potensi dan kinerja ekonominya kepada calon investor. Hal ini akan membuka peluang lebih besar bagi masuknya investasi dari pihak ketiga, yang dapat membantu mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Investasi ini bisa datang dalam bentuk kemitraan, pendanaan proyek, atau dukungan teknologi, yang semuanya akan berkontribusi pada pengembangan desa yang berkelanjutan.

Keunggulan fokus utama kegiatan pengabdian yaitu 1). Peningkatan tata kelola yang lebih baik. Sistem pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dan BUMDes. Ini memungkinkan kontrol dan partisipasi yang lebih baik dari masyarakat. 2). Pelaporan yang terstruktur dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan pendapatan desa, mempermudah pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. 3). Pemberdayaan BUMDes Menuju Desa Mandiri. Peningkatan pendapatan melalui optimalisasi manajemen keuangan BUMDes memberikan potensi besar untuk membangun kemandirian desa, terutama di desa-desa yang memiliki potensi ekonomi yang belum dimaksimalkan. BUMDes yang dikelola dengan baik dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 4). Pengembangan Kapasitas Pengelola. Pengembangan ini melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas pengelola desa dan BUMDes, masyarakat diharapkan memiliki keterampilan yang lebih baik dalam tata kelola keuangan, yang dapat berkelanjutan jangka panjang.

Sedangkan kelemahan luaran antara lain 1). Tantangan Implementasi. Implementasi sistem pelaporan

keuangan yang baru mungkin sulit diadopsi secara cepat oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan atau keterampilan teknologi. Desa yang minim akses teknologi mungkin tidak sepenuhnya mendapatkan manfaat dari sistem ini. 2). Kesiapan masyarakat dan perangkat desa dalam menggunakan sistem yang lebih kompleks bisa menjadi kendala, terutama di lokasi desa yang belum terbiasa dengan tata kelola keuangan modern. 3). Resistensi Perubahan. Adanya resistensi dari sebagian masyarakat atau pengurus desa yang sudah nyaman dengan tata kelola lama dan kurang adaptif terhadap perubahan sistem baru bisa menjadi hambatan dalam penerapan yang maksimal. Tidak semua pengelola BUMDes mungkin memahami manfaat jangka panjang dari sistem pelaporan yang lebih transparan, sehingga bisa terjadi kurangnya dukungan internal. 4). Keterbatasan Dana dan Infrastruktur. Desa dengan infrastruktur yang kurang memadai, seperti akses internet yang terbatas, akan menghadapi tantangan dalam menggunakan sistem pelaporan berbasis teknologi. Biaya untuk menerapkan sistem tata kelola keuangan yang lebih baik juga bisa menjadi kendala, terutama jika desa atau BUMDes belum memiliki pendapatan yang cukup untuk mendanai implementasi ini. 5). Kesesuaian dengan Kondisi Masyarakat. Secara umum, fokus utama kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat desa yang sedang berupaya mencapai kemandirian ekonomi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, akses ke teknologi, serta kemampuan dan kemauan masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem baru. Dengan pendampingan yang intensif dan pelatihan yang memadai, kelemahan-kelemahan yang ada dapat diatasi, dan program ini bisa memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan pendapatan desa serta kemandirian ekonomi masyarakat.

Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan ini sangat bergantung pada kondisi internal desa, yaitu kesiapan SDM, infrastruktur teknologi, dan tingkat partisipasi serta resistensi masyarakat. Desa yang memiliki sumber daya, infrastruktur, dan budaya organisasi yang kuat akan menghadapi kesulitan yang lebih rendah, sedangkan desa dengan keterbatasan di beberapa aspek tersebut akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Pendekatan yang lebih fleksibel dan dukungan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program di desa dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan pendapatan desa melalui tata kelola desa dan BUMDes yang lebih baik dengan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Peningkatan kapasitas perangkat desa dan pengurus BUMDes serta penerapan teknologi dalam sistem pelaporan keuangan menjadi faktor kunci keberhasilan kegiatan ini. Diharapkan hasil yang telah dicapai dapat berkelanjutan dan terus memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi desa.

Kegiatan pengabdian ini berhasil memberikan dampak positif dalam hal peningkatan tata kelola keuangan desa dan BUMDes, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan pendapatan desa. Namun, tantangan terkait keterbatasan SDM, teknologi, dan pendanaan perlu diatasi dengan pendampingan berkelanjutan dan pendekatan yang fleksibel. Dengan dukungan yang tepat, desa-desa yang terlibat dalam program ini dapat mencapai kemandirian yang lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mendanai kegiatan pengabdian ini dengan no. kontrak pengabdian 15715/UN19.5.1.3/AL.04/2024

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M., Kartika, D. and Ferida, A. (2022) 'Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Dan Administrasi Berbasis Digital', DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 6(1), pp. 32–37. doi: 10.32486/dikemas.v6i1.247.
- Alfirdaus, L. K. et al. (2020) 'Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa, Mengefektifkan Dana Desa', Jurnal PENGABDIAN VOKASI, 01(04), p. 269. Available at: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpv/article/view/9251>.
- Arfiansyah, Z., Qadri, R. A. and Firmansyah, A. (2022) 'Pendampingan Pelaporan Keuangan Pada Pengurus BUMDes Di Kabupaten Pacitan', Pengmasku, 2(2), pp. 186–193. doi: 10.54957/pengmasku.v2i2.307.
- Handajani, L. et al. (2021) 'Pendampingan Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa', Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 4(4), pp. 296–303. doi: 10.29303/jpmipi.v4i4.1127.
- Imawan, A. and Mas'adah, N. (2021) 'Transformasi Tata Kelola Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Desa', Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 12(3), pp. 689–710. doi: 10.21776/ub.jamal.2021.12.3.39.

- Lantowa, F. D. and Yusuf, F. M. (2023) 'Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (Sia) Dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Gorontalo', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 7(2), pp. 51–60.
- Nugrahaningsih, P. et al. (2022) 'Knowledge Transfer for Community Development Dengan Aplikasi Excel Pkn Stan Pada Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes (Studi Pada Bumdes Multi Guna Desa Sidomulyo, Madiun)', *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), p. 196. doi: 10.24198/kumawula.v5i2.36321.
- Oktari, V. and Larasati, S. (2023) 'Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Teknologi Digital Pada BUMDES Tanjung Indah Curup Selatan Rejang Lebong', *ALKHIDMAH: Jurnal Pengabdian dan Kemitraan Masyarakat*, 1(1), pp. 41–48. doi: 10.59246/alkhidmah.v1i1.179.
- Savitri, E., Andreas, A. and Diyanto, V. (2019) 'Peningkatan pendapatan asli desa melalui pembinaan revitalisasi BUMDes dan tata kelola dana desa', *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1, pp. 606–613. doi: 10.31258/unricsce.1.606-613.
- Savitri, E., Andreas, A. and Diyanto, V. (2022) 'Pendampingan Pelaporan Keuangan BUMDes Berbasis Web', *Journal of Community Engagement Research for Sustainability*, 2(6), pp. 268–277. doi: 10.31258/cers.2.6.268-277